

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdillah, Pius & Danu Prasetya. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Penerbit Arloka, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Bawaslu RI. *Indeks Kerawanan Pemilu: Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024*. Jakarta: Penerbit Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2023.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar ilmu Politik, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fitriyah. *Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2012.
- Judi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Penerbit Kencana Mada, 2018.
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Rudy, T. May. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994.
- Syamsudin, M. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2021.

JURNAL/ARTIKEL

- Abiyasa, Pulung. "Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu." *Jurnal USM Law*. Vol. 2. No. 2. 2019. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>.
- Akbar, Idil. "Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2. No. 1. 2016. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11852>.
- Diab, Ashadi L. "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering dan Social Welfare." *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 7. No. 2. 2014. <https://dx.doi.org/10.31332/aladl.v7i2.219>.
- Diamantina, Amalia & Lita Tyesta ALW. "Quo Vadis Penegakan Hukum Politik Uang: Potret Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 51. No. 3. 2022. <https://doi.org/10.14710/Mmh.51.3.2022.222-234>.
- Fatona, Nisaul & Siti Ngainnur Rohmah. "Implementasi Asas-Asas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Fiqih Siyasah." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 10. No. 5. 2023. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35857>.
- Firdaus, Sukma Umbara Tirta & Syaiful Anam. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019." *Jurnal Reformasi*. Vol. 10. No. 2. 2020. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915>.
- Ja'far, Muhammad. "Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu." *Jurnal Madani Legal Review*. Vol. 2. No. 1. 2018. <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332>.
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10. No. 2. 2013. <https://doi.org/10.31078/jk1027>.
- Setiawan, Andi & Hilmi Handala. "Jejaring Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak." *Jurnal Academia Praja*. Vol. 3. No. 2. 2020. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.161>.
- Subiyanto, Achmad Edi. "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 17. No. 2. 2020. <https://doi.org/10.31078/Jk1726>.

- Sukimin & Subaidan Ratna Juwita. "Aktualisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*. Vol. 4. No. 1. 2023. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i1.463>.
- Susanto, Efendi. "Sila Ke-Empat Pancasila dan Iklim Demokrasi Indonesia Saat Ini." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 50. No. 1. 2021. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.84-93>.
- Tanjung, Muhammad Anwar, dkk. "Model Pemilihan Serentak di Indonesia: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019." *Jurnal Yudisial*. Vol. 14. No. 3. 2021. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.431>.
- Yuhandra, Erga, dkk. "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu." *Jurnal Ius Contituendum*. Vol. 8. No. 1. 2023. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015>.

INTERNET/LAINNYA

- Azhari, Muhammad Rafi. "Sejarah dan Peranan Bawaslu dalam Demokrasi Indonesia" *Tempo.co*. November 24, 2023.
- Azizah. "Bawaslu Kota Semarang Rilis Peta Kerawanan Pilkada 2024, Isu Netralitas Aparatur Pemerintah dan Politik Uang Jadi Sorotan" *Bawaslu Kota Semarang*. September 21. 2024.
- Habibi, Andrian. "Data Lebih Detail dan Tervalidasi, Lolly: Kunci Sukses Strategi Pencegahan" *Bawaslu RI*. September 5. 2022.
- Mayang, Diera. "Bawaslu Kota Semarang Ajak ASN, TNI, Polri Cegah Pelanggaran dan Identifikasi Isu Krusial Pilkada 2024" *Bawaslu Kota Semarang*. November 13. 2024.
- Pers Release Bawaslu Kota Semarang. "Lakukan Pencegahan Dini, Bawaslu Kota Semarang Petakan TPS Rawan Jelang Pungut Hitung" Bawaslu Kota Semarang. <https://semarangkota.bawaslu.go.id/publikasi/pers-release/lakukan-pencegahan-dini-bawaslu-kota-semarang-petakan-tps-rawan-jelang>. Diakses pada 15 Februari 2025.
- Restu, Vika. "Tahapan Pilkada 2024 Hampir Usai, Bawaslu Kota Semarang Telah Lakukan 1144 Upaya Pencegahan" *Bawaslu Kota Semarang*. Januari 13. 2025.
- Sudarsono. "Indeks Kerawanan Pemilu, Kota Semarang Kategori Rawan Tinggi" *Radio Republik Indonesia*. Desember 19. 2022.

Tangwun, Rodiyah. “Pencegahan dan Mitigasi Isu Krusial pada Pemilihan Tahun 2024” dalam Rapat Koordinasi Pengawas Pemilu dengan Stakeholder Kota Semarang. November 13. 2024.

Tim Hukumonline. “Demokrasi: Sejarah dan Pelaksanaannya di Indonesia” *Hukumonline*. April 5. 2024.

Tim Hukumonline. “Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya” *Hukumonline*. Maret 28. 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

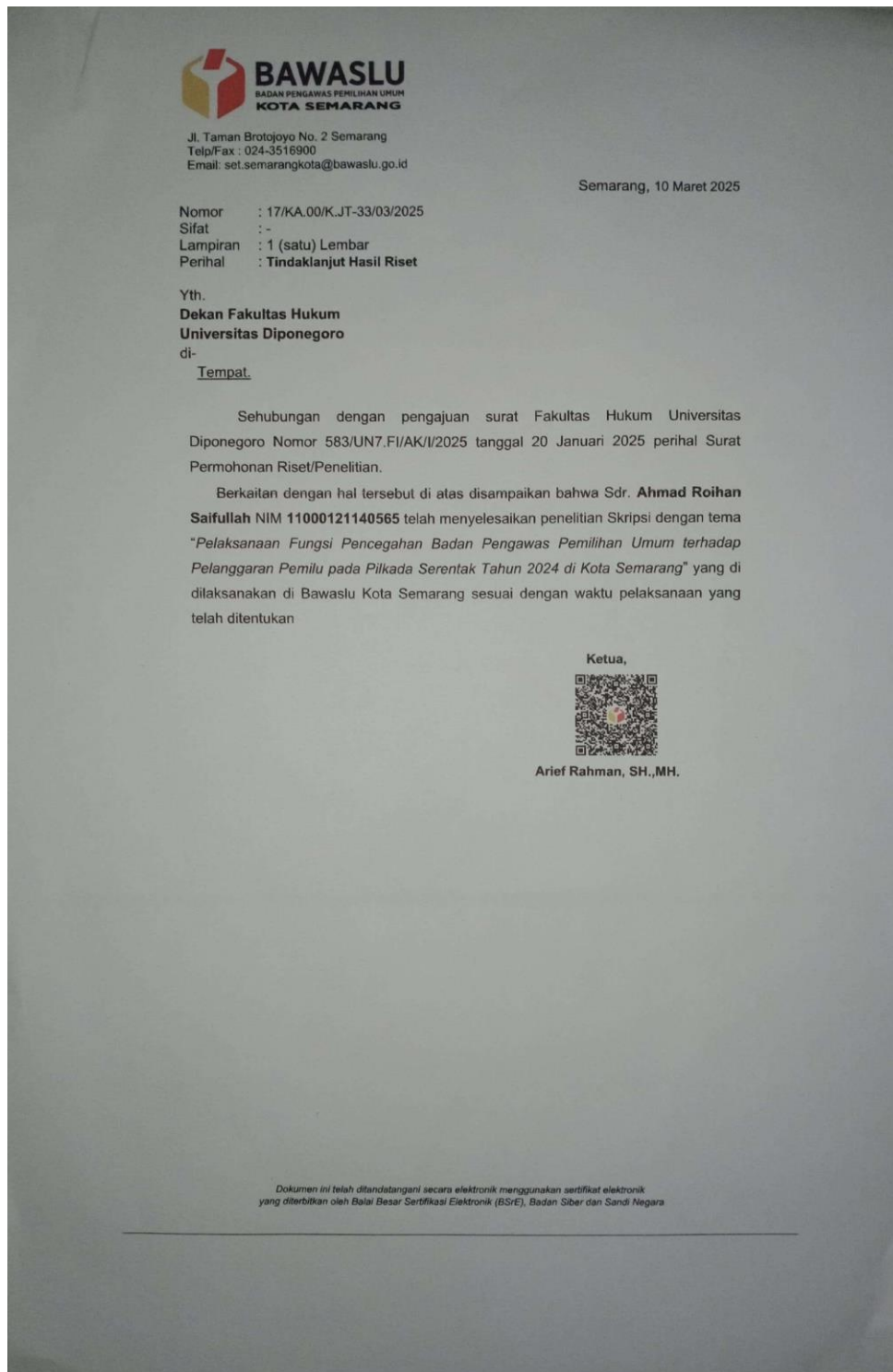
LAMPIRAN

Lampiran 1



Foto bersama Dwijaya Samudera Suryaman, S.E. sebagai Koordinator Divisi P2H Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Semarang

Lampiran 2



Surat Keterangan Riset dari Bawaslu Kota Semarang

Lampiran 3

**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

TANDA BUKTI
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Yang menyerahkan formulir permohonan Informasi Publik:

a. Nama : Ahmad Raihan Saifullah

b. Alamat : Pem. Kelipang Blok BT No.12, RT.003, Rw.004,
Sendang Mulyo, Tembalang, Semarang

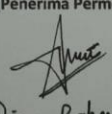
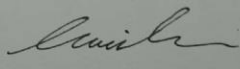
c. Tanggal penyerahan formulir permohonan: 20 Februari 2025

d. Nomor Registrasi Permohonan : 002/HM-02/JT-33/02/2025

Yang menerima formulir permohonan Informasi Publik:

a. Nama : Diera Rahma M.

b. Jabatan : Petugas Layanan Informasi
Semarang (tempat), 20 Februari 2025 (tanggal/bulan/tahun)

Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan)	Pemohon Informasi
 (<u>Diera Rahma M.</u>) Nama dan Tanda Tangan	 (<u>Ahmad Raihan Saifullah</u>) Nama dan Tanda Tangan

Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik kepada Bawaslu Kota Semarang